

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa disertai kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi semakin mempertajam fenomena global (Farazmand, 2001). Dampak globalisasi merambah di berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya maupun bidang pendidikan. Pendidikan merupakan unsur penting dari pembangunan manusia, karena pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan taraf hidup, peningkatan kemampuan, dan kebebasan individu. Pendidikan dan teknologi memegang peran besar untuk mempersiapkan bangsa menuju masa depan. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pada tahun 2019 terjadi wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, virus Corona-19 ini tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka kini dimasa pandemi covid 19 tidak berlaku lagi, semua dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era Pandemi ini karena pendidikan merupakan aset yang utama bagi kemajuan suatu negara. Pada akhirnya Pemerintah membuat suatu kebijakan baru yaitu dengan menerapkan sistem

pembelajaran dari rumah masing-masing yaitu daring (Pembelajaran dalam jaringan). Hal ini juga berdampak dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Polisi Republik Indonesia (Diklat Polri).

Dengan meningkatnya situasi pandemi Covid-19, pimpinan Polri yaitu Kapolri juga mengeluarkan kebijakan agar pendidikan dan pelatihan Polri dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pandemi Covid-19 saat ini telah mengubah kondisi belajar mengajar yang berjalan secara konvensional atau tidak berbasis teknologi menjadi proses belajar yang membutuhkan bantuan teknologi digital. Sistem pembelajaran dan pengasuhan yang semula dilakukan dengan metode tatap muka secara langsung di kelas, saat ini berubah menjadi metode pembelajaran digital, daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Polri, sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden mempunyai kewenangan secara hukum dan mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 Pasal 5). Polri saat ini sangat membutuhkan personel-personel Polri yang mampu bekerja secara profesional dan proporsional untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan rasa aman dan keadilan. Tugas utama Polri adalah melindungi hak warganya serta memelihara keamanan dan rasa aman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polisi bertugas menjadi jembatan, *Problem solver*, pencegah gangguan-gangguan kamtibmas, inspirator dan motivator dalam kehidupan sosial (Requisitoire Indonesia, 2013). Untuk mewujudkan personil Polri yang profesional dan mampu memenuhi tuntutan serta menjalankan tugas pokoknya secara baik, maka Polri berbenah diri/transformatasi dengan memperbaiki aspek-aspek, baik dalam aspek struktural, instrumental maupun kultural. Dalam mewujudkan

kultur penegak hukum maka Polri berupaya dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusianya (Kadarmanta, 2008 :10).

Pendidikan Polri adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terencana/terprogram, terarah, terukur, sistematis dan berlangsung secara berkelanjutan serta dievaluasi hasilnya secara periodik untuk melihat kecocokan dengan rencana dan rancangan profil yang dituju serta secara terus menerus mencari peluang untuk peningkatannya (Kadarmanta (2008 : 217). Pendidikan Pembentukan Bintara Polri ditempuh dalam waktu yang singkat selama 7 (tujuh) bulan, namun keberhasilan tidak dapat diukur dari berapa lama pendidikan itu berjalan, tetapi program pendidikan yang dijalankan harus memenuhi standar kompetensi lulusan. Pendidikan tersebut memiliki tujuan membentuk SDM yang memiliki keahlian-keahlian tertentu seperti negosiasi, komunikasi sehingga dapat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bertujuan untuk melengkapi sumber daya manusia Polri dengan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan tingkah laku (*attitude*) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pendidikan calon Polisi bertujuan membentuk dan mengembangkan personel calon polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku. Pendidikan calon Polisi atau pendidikan pembentukan Bintara Polri memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam filosofi pendidikan calon polisi yaitu mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul. Dikarenakan awal pembentukan anggota Polri bersumber dari masyarakat umum , maka dalam hal ini proses belajar mengajar harus dilakukan secara intensif. Dalam menyelenggarakan pendidikan calon polisi yang diselenggarakan untuk mewujudkan kompetensi SDM Polri tersebut diperlukan kurikulum dan bahan ajar (hanjar) sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di lingkungan Polri untuk calon Bintara Polri (Kadarmanta, 2008). Di dalam Kurikulum dan bahan ajar (hanjar) terdapat muatan materi Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Muatan materi yang

terdapat dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri (Diktuk Ba Polri) sangatlah penting sebab akan menjadi bekal bagi para peserta didik nantinya setelah menjadi anggota Polri. Di dalam Surat Keputusan Kalemdiklat Polri Nomor Kep/396/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2020, ada 4 (empat) materi yang diberikan Lemdiklat Polri dalam proses Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yaitu : 1) Proses pembentukan karakter kebhayangkaraan pelatihan sikap tatanan nilai; 2) Pengenalan dan penanaman nilai-nilai etika profesional Polri, tradisi dan doktrin di organisasi Polri; 3) Pengajaran pengetahuan kepolisian, teori, teknis dan taktis kepolisian serta tugas-tugas Polri di masyarakat; 4) Pelatihan keterampilan umum dan keterampilan khusus, teknis dan taktis teori kepolisian. Dari keempat materi tersebut diharapkan Lemdiklat Polri mampu menghasilkan anggota Polri yang berkarakter kebhayangkaraan kuat, memiliki integritas moral tinggi, pengetahuan teori, keterampilan teknis dan taktis serta memiliki pengalaman tugas fungsi Kepolisian.

Tujuan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri adalah membentuk Bintara Polri yang berkarakter kebhayangkaraan, sehat jasmani dan rohani, professional dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas Polri. (Kurikulum Diktukba T.A. 2020-2021). Seiring berjalannya waktu Polri melakukan Transformasi menuju Polri yang Presisi, untuk mewujudkan semua itu maka dalam pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara Polri pada tahun yang akan datang memiliki tujuan membentuk Bintara Polri yang berkarakter kebhayangkaraan, sehat jasmani dan rohani dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparan berkeadilan (Presisi). (Kurikulum Diktukba Polri T.A. 2021-2022). Guna mendukung kebijakan Kapolri tentang transformasi menuju Polri yang Presisi maka harus adanya bahan ajar (hanjar) Karakter kebangsaan guna mewujudkan anggota Polri yang berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, berjiwa patriot dan penolong.

Pendidikan Polri adalah suatu proses yang penting dalam membentuk sumber daya manusia Polri untuk memperkuat personil Polri yang akan

diberikan tugas-tugas kepolisian di semua tingkat kesatuan Polri. Disamping itu Pendidikan Polri juga merupakan pembinaan manajemen sumber daya manusia yang dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Polri tetap berpedoman pada prinsip keterpaduan dengan tujuan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Didalam prinsip keterpaduan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 (2017:897) bahwa semua sistem dan jenjang kependidikan Polri berada dalam satu lembaga yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri), yang mengarah pada sistem pendidikan satu pintu, dengan harapan Lemdiklat Polri akan melahirkan calon anggota Polri yang berkualitas, siap kerja, memiliki mental fisik yang tangguh juga memiliki produktivitas, profesionalisme dan kinerja yang tinggi, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan, disiplin dalam tugas, motivasi dan hasrat untuk terus meningkatkan prestasi, keterbukaan diri, integritas moral akan kejujuran dan kualifikasi lainnya. Dengan demikian dapat diharapkan dapat menjawab tugas dan tantangan Polri dimasa kini dan masa yang akan datang terhadap tuntutan masyarakat, yaitu tuntutan perubahan agar Polri dapat menjadi sahabat masyarakat. Maka dapat menumbuhkan cara pandang baru dalam tubuh Polri melalui perubahan *mindset* dan *culture set* yaitu budaya kepolisian dari paradigma polisi militeristik menjadi polisi sipil (*civilian police*) yang demokratis, menegakkan hukum dan hak asasi manusia sehingga akan terjadi suatu hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat (Kadarmanta, 2008 :10).

Bintara Polri adalah garda paling depan yang berperan sebagai pelaksana utama tugas kepolisian yang mampu menjadi komunikator Polri dan masyarakat. Setiap masyarakat yang memerlukan layanan atau bantuan kepolisian pasti akan berhadapan dengan Bintara Polri. Bintara Polri terdiri dari pria dan wanita. Untuk Bintara Polri yang wanita biasa disebut dengan Polisi Wanita atau Polwan. Polisi wanita (Polwan) bertugas dalam penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik korban maupun pelaku kejahatan. Tugas Polwan di Indonesia

terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkoba dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi pria. (Wikipedia Polisi_Wanita). Kelebihan Polwan adalah lebih humanis, lebih baik dalam pelayanan publik, lebih kuat menghadapi praktik suap dan korupsi dan cocok untuk kasus perempuan dan anak (Kadarmanta, 2008).

Program pendidikan/pelatihan antara calon polisi pria dan wanita juga seharusnya tidak ada perbedaan, baik dari segi latihan fisik maupun ketahanan karena hal ini akan membentuk calon polisi yang handal dan memiliki standar yang sama (Lagested dan Tillaar, 2014). Dalam perkembangan program calon polisi pada polisi wanita (polwan) menghadapi beberapa isu seperti perbedaan *gender*, kepercayaan dan lain sebagainya, yang seharusnya tidak menjadi suatu penghalang dalam pemberian *treatment* bagi calon polisi wanita. Dengan *treatment* yang sama dengan calon polisi pria akan memberikan suatu standar mutu yang sama (Bykov, 2014). Pemberian *treatment* yang pas pada program pelatihan/pendidikan calon polisi akan memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan dan ketahanan dari calon bintara. Pada penelitian yang dilakukan dengan memberikan *treatment* pada kelas *experiment* dan kelas kontrol didapatkan bahwa menunjukkan hasil yang berbeda pada ketahanan dan kekuatan dari calon polisi (Orr *et al*, 2016).

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses yang sistematis, holistik, terintegrasi dan komprehensif dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kualitas dari pada lulusan pendidikan pembentukan Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Negara (SPN) dan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri, belum cukup dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilannya saja/mahir (*Hard skill*) tetapi harus ditumbuh kembangkan nilai-nilai dan sikap/perilaku (*soft skill*) yang meliputi tanggungjawab terhadap pekerjaan, disiplin dalam tugas, motivasi dan hasrat

untuk terus meningkatkan prestasi, keterbukaan diri, integritas moral akan kejujuran dan kualitas lainnya. Meningkatkan *soft skill* siswa dengan proses berfikir berdasarkan kepribadian sangatlah penting. Dengan memiliki pengetahuan Kepolisian yang luas didukung *soft skill* dalam proses berfikir diharapkan hasil lulusan dapat menjawab tantangan tugas yang setiap harinya semakin berkembang. Sehingga hasil lulusan Polri dapat terlatih berfikir secara cepat dan tepat dalam setiap permasalahan di masyarakat (M.J. Dewiyani : 2015, pp. 118~129).

Dalam mencapai proses pendidikan Polri yang berbasis kompetensi diperlukan adanya Profil Polri, kerangka kurikulum untuk pendidikan Polri, ketersediaan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, proses evaluasi dan adanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan mumpuni. Dalam proses pembelajaran pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri komponen standar pendidikan sangat diperlukan, yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 (2015 :13) yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan Polri; (2) Standar Isi meliputi Kurikulum dan bahan ajar (Hanjar) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan Polri; (3) Standar proses terdiri dari proses pembelajaran dan pengasuhan pada setiap program pendidikan Polri; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; (5) Standar Sarana dan Prasarana meliputi fasilitas pendidikan dan alat instruktur/alat penolong instruktur (*alins alongins*) pada setiap satuan pendidikan Polri; (6) Standar Pengelolaan dilaksanakan dengan pentahapan sebagai berikut : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; (7) Standar Pembiayaan pendidikan Polri terdiri dari : biaya investasi dan biaya operasional; (8) Standar Penilaian. Untuk satuan Pendidikan yaitu SPN dan Sepolwan harus mempersiapkan 8 (delapan) komponen standar Pendidikan tersebut yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik, selain itu diperlukan juga kerjasama dengan para

orangtua untuk memberikan pengawasan secara intensif supaya para calon anggota Polri (peserta didik) tetap disiplin dan taat pada aturan yang telah ditetapkan, mengingat pembelajaran akan dilakukan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sedangkan untuk materi praktek keterampilan teknis taktis profesi tidak dapat dilakukan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dalam pelaksanaan operasional pendidikan, Lemdiklat Polri merujuk pada 8 (delapan) standar komponen pendidikan tersebut, guna mencapai hasil yang sesuai dengan standar komponen tersebut maka diperlukan suatu sistem yang terdiri dari *input*, *proses* dan *output*. Dalam sistem pendidikan yang menjadi *input* adalah peserta didik dan sebagai *outputnya* adalah hasil didik/lulusan yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Guna mendapatkan hasil didik yang berkompeten maka diperlukan suatu proses pendidikan yang dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan sesuai delapan standar komponen pendidikan tersebut diatas.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis Polri (Renstra Polri) telah ditetapkan 13 Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu program tersebut adalah Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Polri. Adapun Program Pendidikan dan latihan Aparatur Polri T.A. 2020 memiliki 9 (sembilan) Program Pendidikan Polri meliputi :

- (1) Program Pendidikan Pembentukan Perwira Polri;
- (2) Program Pendidikan pembentukan Tamtama dan Bintara Polri;
- (3) Program Pendidikan Pengembangan Umum Polri;
- (4) Program Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Polri;
- (5) Program Pendidikan Kerjasama Dalam Negeri (Kermadagri) Polri;
- (6) Program pendidikan Luar Negeri Polri;
- (7) Program Pelatihan Polri;
- (8) Program Pelatihan Terpusat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (9) Program Pelatihan Kerjasama Luar Negeri pada Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kep/2502/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2020). Didalam 9 (sembilan) program tersebut salah satunya adalah Program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri) merupakan unsur pendukung dibawah Kapolri yang bertugas sebagai pelaksana strategi penguatan bidang pembinaan, khususnya Program Sumber Daya Manusia untuk menyediakan personil melalui pendidikan pembentukan dan pengembangan. Lemdiklat Polri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional, modern, terpercaya, unggul dan berintegritas serta dituntut untuk senantiasa mampu mengikuti dampak perubahan perkembangan dengan mengoptimalkan Pendidikan Polri. Salah satu satuan kerjanya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan Pembentukan Bintara Polri serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Rencana Kerja (Renja) atau kebijakan Kapolri.

Program Pendidikan yang dilaksanakan di Sepolwan Lemdiklat Polri selain melaksanakan Program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri (Polwan) juga melaksanakan program pendidikan spesialisasi Polri (Dikbangspes Polri).

Menurut Anam (2018, p.77-78) Sistem pendidikan Polri harus mampu mencetak lulusan personel Polri yang unggul dan bisa mengimbangi kemajuan jaman yang semakin modern, memiliki kepribadian yang baik serta semangat yang tinggi. Untuk mewujudkan personel Polri yang berkualitas maka harus membuat terobosan baru dengan menjadikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sebagai *centre of excellence* (pusat keunggulan). Lemdiklat Polri diharapkan menjadi motor penggerak dalam upaya peningkatan kinerja Polri untuk menjadi organisasi yang unggul melalui terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Bambang Hendarso Danuri dalam Profil SPN Jambi menyebutkan "*Jago Negeri Bangum Jayo*" Menuju terwujudnya Lemdiklat Polri sebagai *Centre of Excellence* mengemukakan bahwa :

"Seluruh Lembaga pendidikan Polri juga harus dibenahi, kemudian merencanakan perubahan sesuai prioritas, disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kepentingan pelaksanaan tugas. Perlu dipahami bahwa perubahan kultur sesungguhnya berawal dari Lembaga Pendidikan". (SPN Jambi, 2010).

SPN adalah institusi pendidikan Polri yang bertujuan membentuk personil Polri yang diharapkan mampu menjadi *lifetime learner* yang siap pakai, mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. (Anam, 2018).

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri) sebagai *centre of excellence* (pusat keunggulan) harus mampu untuk melakukan perubahan/transformasi menjadi suatu pusat keunggulan (*centre of excellence*). Hal ini diperkuat dengan 8 (delapan) prioritas yang dicanangkan saat ini meliputi :

1. Mampu mencetak lulusan personil Polri yang unggul yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap lebih baik dari yang lain, memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan dan dapat menjadi mitra masyarakat yang dapat melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat (Perkap 14 Pasal 4 Tahun 2015 tentang Sisdik Polri). Didukung kesiapan protokol kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
2. Kampus maksimum security, sebagai objek vital Polri. Oleh karena itu harus dijaga ketat serta dirawat keberadaannya. Kampus sebagai *centre of excellence*, yang menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan di era 4.0 menuju 5.0.
3. Pembinaan Karir dan promosi personil yang berdinamis di Lemdiklat Polri dan jajaran dalam rangka memberikan motivasi berupa reward.
4. Transformasi Kurikulum Polri yang presisi, meliputi bahan ajar yang mendukung pencapaian Polri yang Presisi yaitu : Sejarah Polri, Wawasan Kebangsaan, Hubungan Antar Suku Bangsa, Demokratisasi dan Globalisasi, serta Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0.
5. *Rightsizing* struktur Lemdiklat Polri (*Rightsizing* adalah reposisi dan realokasi sumberdaya manusia dan sumberdaya-sumberdaya lainnya untuk difokuskan pada peningkatan kompetensi inti agar organisasi memiliki keunggulan bersaing.

6. Pendidikan dan pelatihan Integrasi TNI-Polri yang bertujuan agar terdapat persamaan persepsi pengejawantahan bela negara guna menghadapi perkembangan global yang dapat mengancam gangguan instabilitas negara baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
7. Mampu menjadi pusat ilmu pengetahuan kepolisian dari berbagai permasalahan yang ada dalam organisasi maksudnya adalah Lemdiklat Polri mampu menjadi pengendalian pendidikan, kegiatan di bidang penerangan dan pustaka (menyediakan Diktat/buku-buku, hanjar atau referensi) yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan organisasi, pengumpulan informasi pengolahan data serta tata cara dan prosedur pengolahan informasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan juga mengadakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang ada dalam masyarakat dan di jajaran Lemdiklat Polri. Terwujudnya PTIK menjadi Universitas Keamanan.
8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri harus mempunyai proses perencanaan, evaluasi dan kontrol yang komprehensif dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, dengan melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidangnya agar memiliki standar kinerja yang tinggi dengan mempunyai proses kerja yang unggul. Contohnya menyusun piranti lunak yang baku dan harus dipatuhi oleh setiap anggota yang berada di dalamnya sebagai standar acuan dalam bekerja.

Reformasi Polri saat ini telah menampakkan hasil baik pada aspek struktural maupun aspek instrumental yang menetapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai Polisi yang berwatak sipil (*civilian police*), sementara pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui pembenahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran dan sistem operasional. Pada aspek kultural menjadi salah satu bidang yang menjadi perhatian dan prioritas karena mengubah *mind set* dan paradigma Polri

menjadi pelayan masyarakat yang menjadi rangkaian agenda dalam *grand strategi* Polri.

Program Grand Strategi Polri 2005-2025 sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut :

1. Tahap satu *Trust Building* (Membangun Kepercayaan) (2005-2010) (sudah dilaksanakan), *Trust Building*, yakni membangun kepercayaan internal Polri yang merupakan awal dari perubahan menuju pematangan kepercayaan (*trust building*) internal meliputi : Kepemimpinan, sumber dana, SDM, organisasi yang efektif, pilot proyek yang konsisten di bidang *Hi-tech*, kemampuan hukum dan sarana prasarana mendukung visi misi Polri.
2. Tahap dua 2010-2015 (sudah dilaksanakan), merupakan tahap *Partnership Building* (Kemitraan) yakni membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, penganyoman untuk menciptakan rasa aman.
3. Tahap ketiga 2015-2025, tahap *Strive for Excellence* (Organisasi unggulan) yakni membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good governance* dan *clean government*, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastrukturnal materiil fasilitas dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional dan internasional.

Pada tahap *Strive for Excellence* (Organisasi unggulan) upaya Lemdiklat Polri untuk menuju Lembaga pendidikan sebagai *centre of excellence* yaitu dengan melakukan pengembangan-pengembangan di dalam Lemdiklat Polri maupun di luar Lemdiklat Polri. Adapun pembenahan di dalam Lemdiklat Polri adalah dengan melakukan perubahan di era disrupsi ini dengan membangun fasilitas *IT Center* Lemdiklat Polri. *IT Center* Lemdiklat Polri merupakan sistem IT untuk mendukung pengelolaan proses diklat Polri berbasis IT. Seluruh proses tersebut diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pendidikan dan Latihan Lemdiklat Polri. Yang langsung dikendalikan dari *IT Center* Lemdiklat Polri, melengkapi fasilitas yang dimiliki oleh Lemdiklat Polri meliputi, *e-Library*, ruang produksi untuk pembuatan video bahan ajar pada *smart class*, *editing room*, *video*

conference room. Dengan fasilitas ini, seluruh program pendidikan bisa di monitor. Baik proses belajar dan latihan maupun *data base* peserta didik. Pembangunan *IT Center* ini merupakan upaya untuk membangun SDM Polri yang profesional dan berintegritas, unggul serta kompetitif.

Pengembangan-pengembangan di luar Lemdiklat yaitu pemahaman kebutuhan peserta didik, *Stakeholders* dan masyarakat. Dalam hal ini Lemdiklat Polri ingin menciptakan hasil didik yang siap pakai yang mempunyai kompetensi yang dapat menjawab tantangan tugas organisasi dan masyarakat. Selain itu upaya Lemdiklat Polri untuk menuju Lembaga pendidikan sebagai *centre of excellence* yaitu dengan melakukan evaluasi penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Pada saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang sedang melanda seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat berdampak di berbagai sektor, khususnya sektor pendidikan, seperti pendidikan kepolisian. Akan tetapi Pendidikan di Kepolisian tetap harus berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, begitu juga pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, maka sesuai dengan kebijakan pimpinan tertinggi Polri, pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan Prokes Kesehatan 3 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak). Guna mendukung terlaksananya pendidikan pembentukan Bintara Polri tersebut maka di setiap satuan pendidikan yaitu Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Sepolwan harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ketentuan di masa pandemi Covid-19 ini yaitu dengan menyiapkan tempat cuci tangan di beberapa titik, menyiapkan ruang kelas lebih dengan mengatur jarak bangku siswa.

Pada masa pandemi Covid 19 perlakuan terhadap pembelajaran pendidikan dan pelatihan Polri mengalami perubahan dengan inovasi-inovasi pembelajaran di mana interaksi staf pengajar/instruktur dan peserta didik sangat terbatas sehingga inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan interaksi agar hasil didik tetap terjaga kualitasnya. Pandemi Covid 19 saat ini masih pada fase yang sangat mengkhawatirkan

di mana data awal terdapat penyebaran terhadap para peserta didik di beberapa SPN sehingga perlu diambil langkah efektif guna menghindari penyebaran yang semakin masif namun diharapkan peserta didik masih bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran, maka berdasarkan hal tersebut diatas Lemdiklat Polri mengambil langkah pengalihan pembelajaran Diktukba Polri dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Peserta pendidikan pembentukan Bintara Polri dimasa Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Total peserta yang ikut 11.203 orang. Terdiri dari Polisi laki-laki 10.843 orang dan Polisi wanita (Polwan) 560 orang. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diselenggarakan di 31 SPN se-Indonesia dan untuk Polisi wanita (Polwan) diselenggarakan di Sepolwan.

Peserta didik (serdik) Pendidikan Pembentukan Bintara Polri (Diktukba Polri) T.A. 2020/2021 telah melewati tahap Dasar bhayangkara (Dasbhara), tahap pembelajaran dan sedang memasuki tahap pembulatan. Tahap Dashara Diktukba Polri T.A. 2020/2021 dilaksanakan selama 2 (dua) minggu di Satuan pendidikan dan pelatihan (Satdiklat) dan dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing dengan pertimbangan mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 dan kluster baru di lingkungan Satuan pendidikan dan pelatihan (Satdiklat). Tindak lanjut dari pengembalian Serdik ke tempat tinggal masing-masing dengan melaksanakan pembelajaran secara daring atau *online* sampai dengan 2 (dua) minggu menjelang tahap pembulatan. Setelah itu proses pendidikan dilanjutkan dengan metode tatap muka dengan mengoptimalkan tahap pembelajaran.

Setelah tahap pembelajarn berakhir maka akan dilanjutkan dengan tahap pembulatan yang akan dilaksanakan di luar Sepolwan akan tetapi dikarenakan situasi pandemi Covid-19 maka kegiatan dilaksanakan di dalam lingkungan Sepolwan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum para peserta didik (serdik) kembali ke Lembaga Pendidikan maka harus dilakukan pengecekan kesiapan Satdiklat (SPN dan Sepolwan) dari segi sarana dan prasarana apakah sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sehingga operasional pendidikan dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam situasi pandemi Covid-19.

Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk apapun pada akhirnya menuju kepada suatu perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang mencakup perubahan peningkatan kemampuan di bidang pengetahuan yang menyangkut mental atau otak (Kognitif), perilaku atau sesuatu yang terkait dengan sikap dan nilai (afektif) dan keterampilan atau skill (psikomotor). Program Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang efektif adalah program diklat yang dapat dikatakan berhasil. Diklat yang dianggap berhasil adalah diklat yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku atau sikap pada pesertanya.

Dengan adanya perubahan sistem pembelajaran pada pendidikan pembentukan Bintara Polri dimasa pandemi Covid 19 ini maka perlu juga melakukan evaluasi untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan dan capaian tujuan pendidikan program pendidikan pembentukan Bintara Polri dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan untuk pendidikan selanjutnya khususnya dimasa pandemi.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi dimana dari hasil evaluasi tersebut diharapkan fungsi diklat benar-benar memberikan daya pengaruh yang signifikan untuk peningkatan kinerja terhadap suatu individu dan suatu organisasi/lembaga.

Bedasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Pada Saat Kondisi Pandemi Covid-19 Di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri”.

1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penulisan ini pada “Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Pada Saat Kondisi Pandemi Covid-19 di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri T.A. 2020/2021”, dengan Sub Fokus yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan desain dengan merumuskan tujuan program Pendidikan pembentukan Bintara Polri; menyiapkan peserta didik (serdik), staf dan kelengkapan lainnya, merumuskan standar program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;
2. Tahap Penetapan kelengkapan program yaitu meninjau kembali 8 (delapan) standar pendidikan, meninjau program yang sedang berjalan alokasi waktu pendidikan, meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai;
3. Tahap Proses yaitu dengan pengumpulan data diantaranya evaluasi pada tahap I (Pembentukan Dasar Bhayangkara), tahap II (Pembekalan Profesi Kepolisian), tahap III (penutupan dasar bhayangkar, latihan teknis, latihan kerja/pembulatan) pada pelaksanaan program pendidikan pembentukan Bintara Polri;
4. Tahap pengukuran tujuan yaitu mengadakan analisis data dan output yang diperoleh, dengan hasil penilaian pada aspek akademik, aspek mental kepribadian, aspek kesamaptaan jasmani bagi para peserta didik (serdik);
5. Tahap perbandingan yaitu upaya memperoleh data tentang kemajuan para peserta didik untuk menentukan apakah ada perubahan perilaku sesuai yang diharapkan.

1.3. Pertanyaan Penelitian atau Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merumuskan tujuan program Pendidikan pembentukan Bintara Polri; menyiapkan peserta didik (serdik), staf dan kelengkapan lainnya, serta merumuskan standar program Pendidikan Pembentukan Bintara Polri ?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara Polri dengan meninjau kembali 8 (delapan) standar pendidikan, dan program yang sedang berjalan alokasi waktu pendidikan, serta meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai ?

3. Bagaimana evaluasi pada tahap I (Pembentukan Dasar Bhayangkara), tahap II (Pembekalan Profesi Kepolisian), tahap III (penutupan dasar bhayangkar, latihan teknis, latihan kerja/pembulatan) pada pelaksanaan program pendidikan pembentukan Bintara Polri ?
4. Bagaimana analisis data dan output yang diperoleh dari hasil penilaian pada aspek akademik, aspek mental kepribadian, aspek kesamaptaaan jasmani bagi para peserta didik (serdik)?
5. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan program pembentukan Bintara Polri di Sekolah polisi wanita untuk menentukan apakah ada perubahan perilaku sesuai yang diharapkan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini agar memahami dan menjelaskan secara komprehensif pelaksanaan dan capain tujuan penyelenggaraan program pembentukan Bintara Polri Pada Saat Kondisi pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri T.A. 2020/2021 dengan melihat kualitas/mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 8 (delapan) standar pendidikan. Melalui pengumpulan data dan fakta, kemudian menilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan sehingga diperoleh kesimpulan dan rekomendasi untuk melengkapi, memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan program pendidikan dan pembentukan Bintara Polri (Polwan) yang lebih efektif dan efisien dikemudian hari khususnya dimasa pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi di Negara Indonesia.

1.5. State of The Art

Untuk mengetahui kebaharuan penelitian ini maka peneliti membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada *state of The art* ini diambil dari beberapa penelitian sebelumnya dan akan menjadi acuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Adapun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama dari Lagestad dan Tilaar *Journal of Strength and Coditioning Research* pada tahun 2014, dengan metode penelitian

kuantitatif, tujuan dari penelitian ini adalah bahwa Program pendidikan/pelatihan yang diberikan pada calon polisi perempuan dengan *treatment* yang sama yakni *bench press, pull-ups, and standing long jump* tidak ada perbedaan diantara kedua *gender* tersebut yang diberikan perlakuan yang sama. Maka hasil menunjukkan program pelatihan untuk calon polisi perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan baik dari kekuatan maupun ketahanan sama.

Penelitian kedua dari M.J.Dewiyani *Journal of Improving Students Soft Skills using Thinking Process Profile Based on Personality Types. Head of Center for Educational Development & Instructional Activities* pada tahun 2015. Pada penelitian ini meningkatkan *soft skill* siswa dengan menggunakan proses berfikir berdasarkan tipe kepribadian. *Soft skill* sangat penting bagi lulusan bintanga Polri. Dengan memiliki pengetahuan yang luas didukung *soft skill* dalam proses berfikir diharapkan hasil lulusan Bintang Polri dapat menjawab tantangan tugas yang setiap harinya berkembang apalagi permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat, dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kompleks dan beragam.

Penelitian ketiga dari Robin M. Orr, Kelie Ford, and Michael Stierli, *Journal of Strength Condition Resources*, pada tahun 2016. Pada penelitian ini Program yang diberikan harus memperbaiki mutu kualitas yang akan dicapai. Pemberian *treatment* yang pas pada program pendidikan/pelatihan calon Polisi akan memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan dan ketahanan dari calon Bintang Polri tersebut. Pada penelitian yang dilakukan dengan memberikan *treatment* pada kelas *experiment* dan kelas kontrol didapatkan bahwa menunjukkan hasil yang berbeda pada ketahanan dan kekuatan dari calon peserta pelatihan.

Penelitian keempat dari Crawley AA, Sherman RA., Crawley WR, Casio-Lima, *Journal Physical Fitness of Police Academy Cadets: Baseline Characteristics and Changes*, pada tahun 2016. Pada penelitian ini menggunakan uji coba kesamaptaan (*push-up, sit-up, lari*) bertujuan untuk mengetahui karakteristik dasar kebugaran jasmani peserta didik/taruna dan menilai efektifitas program pelatihan selama 16 minggu.

Penelitian kelima dari Jeffry L.White,G.H. Massiha, *Journal of Evaluation and Research in Education*, pada tahun 2016. Pada penelitian ini Perbedaan gender tidak terbatas pada masalah karir dan keluarga. Wanita (lebih dari pria) merasa bahwa profesi mereka harus bermanfaat bagi masyarakat. Bakat dan pelatihan saja tidak cukup untuk sukses. Terlepas dari apa yang seharusnya menjadi keuntungan, dalam banyak kasus wanita tidak tampil sebaik pria sehingga menciptakan tingkat retensi yang lebih rendah. Hal ini mengarah pada perbedaan aspirasi antara laki-laki dan perempuan serta keyakinan tentang kompetensi mereka sendiri yang mungkin terkait dengan perbedaan budaya dan sosial.

Penelitian keenam dari Chairul Anam pada tahun 2018. Jurnal Ilmu Kepolisian. Pada penelitian ini menyatakan bahwa Sistem pendidikan Polri harus mampu menciptakan personel Polri yang unggul dan bisa mengimbangi kemajuan jaman yang semakin modern. SPN (Sekolah Polisi Nasional) merupakan institusi pendidikan Polri yang membentuk personil Polri yang mampu menjadi *lifetime learner* yang siap pakai, berkontribusi positif bagi masyarakat.

1.6. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktis

a. Penulis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan Ilmu Manajemen Pendidikan.

b. Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam institusi Polri guna pengambilan keputusan lebih lanjut dalam menyusun program pendidikan, menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat di masa pandemi Covid-19 agar penyelenggaraan program pendidikan pembentukan Bintara Polri pada saat kondisi pandemi Covid-19 selanjutnya menjadi lebih baik.

2. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi evaluator internal untuk evaluasi program “pendidikan pembentukan Bintara Polri Pada Saat Kondisi pandemi Covid-19 di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri”.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di Prodi pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang berhubungan dengan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan model evaluasi Discrepancy/kesenjangan

